

PERANGKAP PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS NEOLIBERALISME DAN IRONI KEMISKINAN DI INDONESIA

Angga Nurdin Rachmat

Abstract:

The true concept of development to alleviate poverty carried in fact only bring countries into the developing countries the problem of poverty itself. It can not be separated from the spirit of neoliberalism development concept promoted by western countries as a prescription eradication of poverty in developing countries. Similarly, Indonesia has done development for 50 years, it does not bring people to prosperity. Therefore, this paper attempts to discuss the operationalization of neo-liberalism in the economic development of Indonesia. concepts of economic development undertaken by the Indonesian government is very strong with the values of neo-liberalism that poverty becomes its own irony in economic development efforts. This paper saw the return of Pancasila as the basis for economic development becomes a necessity to achieve the ideals of the welfare of the Indonesian people and get out of the poverty that still shackled.

Keywords:

economic development, neoliberalism, indonesia, poverty

Pendahuluan.

Kemiskinan, menjadi salah satu istilah yang sudah tidak asing lagi kita dengar dalam percakapan sehari-hari. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi dimana manusia tidak memiliki uang untuk mendapatkan akses terhadap makanan yang layak atau memenuhi kebutuhan hidupnya dan seringkali berada dalam kondisi *un or underemployed*.¹ Kondisi inilah yang mungkin paling sering digunakan dalam menggambarkan kemiskinan yang seringkali kita lihat dalam tataran riil untuk mengkategorisasikan orang-orang yang disebut masyarakat miskin. Kemiskinan menjadi salah satu agenda besar yang ingin dikurangi dalam setiap kebijakan ekonomi pemerintah manapun di dunia tidak terkecuali Indonesia. Indonesia hingga saat ini masih berkuat dengan permasalahan kemiskinan yang masih membelenggu sebagian besar rakyatnya.

¹ Caroline Thomas, Poverty Development and Hunger, dalam *Globalization in World Politics* 3rd eds, Jhon Baylis and Steve Smith, (ed) (Oxford : Oxford University Press, 2001) 647.

Secara teoritis pertumbuhan ekonomi berlangsung terus, pada akhirnya akan membawa setiap penduduk akan terangkat di atas garis kemiskinan absolut.² Namun ternyata teori ini tidak berlaku di Indonesia, Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkisar 5% hingga 6% pertahun agaknya belum mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, bahkan sebaliknya terjadi peningkatan penduduk miskin yang saat ini berkisar 37 juta jiwa.³ Sementara sebuah riset yang dilakukan oleh Bank Dunia menyebutkan bahwa hampir 50% dari penduduk Indonesia berada dalam kategori miskin dan “nyaris miskin”. Kondisi ini diperburuk dengan semakin lebar dan tampak semakin nyata jurang kesenjangan sosial diantara masyarakat Indonesia.

Sungguh sebuah Ironi karena sudah 66 tahun Indonesia merintis pembangunannya ekonomi dengan modal sumber daya alam yang sangat melimpah, namun mengapa hingga saat ini belum berhasil untuk mengatasi permasalahan kemiskinan bahkan kemiskinan menjadi permasalahan yang sangat akut bagi Indonesia?. Tulisan ini ingin menganalisis keterkaitan antara neoliberalisme yang saat ini sangat kental terasa dalam sistem ekonomi Indonesia dengan ironi realitas kemiskinan yang ada. Dimana neoliberalisme menjadi katalisator bagi meningkatnya jumlah masyarakat miskin yang ada di Indonesia sebagai konsekuensi dari pihak yang kalah dalam persaingan memperebutkan akses terhadap sumber ekonomi sesuai dengan preskripsi kompetisi bebas yang dianut oleh ideologi tersebut. Selain itu tulisan ini diarahkan untuk kembali menggali dimana nilai-nilai ekonomi pancasila yang seringkali diklaim sebagai dasar sistem ekonomi Indonesia sebagai *counter* terhadap neo-liberalisme dan mensejahterakan rakyat Indonesia.

Neoliberalisme dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia.

Neoliberal sebagai paham berawal dari sebuah konferensi di Mount Pelerin Swiss pada tahun 1947 yang kemudian menghasilkan kelompok Mount Pelerin Society sebagai kelompok yang menaruh perhatian besar terhadap perkembangan neoliberalisme ini. Neoliberalisme menjadi instrumen untuk kembali memperbaiki tatanan ekonomi pasca perang dan rekonstruksi di Eropa yang ternyata menuai keberhasilan melalui *Marshall Plan*. Frederich von Hayek dan Milton Friedman merupakan otak dari pemikiran ini, dalam konteks ini Friedman mengajukan gagasan bahwa intervensi negara seperti memberikan subsidi, upaya stabilisasi dan suntikan investasi hanya akan membangkrutkan negara tersebut sementara Hayek mengajukan gagasan bahwa keunggulan kapitalisme pasar bebas

² Budi Winarno, *Globalisasi Peluang atau Ancaman Bagi Indonesia* (Jakarta : Erlangga, 2008) 13.

³ Sri Liani Suselo dan Tarsidin, “Kemiskinan di Indonesia : Pengaruh Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi”, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Oktober 2008, 156.

bermula dari interaksi yang berjalan secara alamiah.⁴ Hal mendasar terkait dengan paham neoliberalisme ini adalah keyakinan mengenai pengagungan mekanisme pasar sebagai “*the invisible hand*” yang akan dapat mendistribusikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat dengan mengurangi keterlibatan negara didalamnya. Gagasan neoliberal menuai kemenangan pada dekade 1980an pada masa kepemimpinan Ronald Reagan di AS dan Margaret Thatcher di Inggris.⁵ Kondisi ini terkait dengan depresi besar yang terjadi di kedua negara tersebut, yang kemudian dapat diatasi dengan menerapkan kebijakan neoliberal tersebut.

Ide-ide neoliberalisme ini kemudian menjadi ruh dari berbagai lembaga donor seperti IMF, WTO dan Bank Dunia yang menjadi instrumen untuk menyebarkan ide neoliberalisme ke seluruh negara di dunia. Dimana pada tahun 1970an terjadi reformasi ekonomi di negara-negara berkembang terkait dengan fakta bahwa kebijakan ekonomi yang berlaku telah menyebabkan permasalahan dalam bidang ekonomi yang sangat mendesak negara-negara tersebut untuk mencari kebijakan alternatif yang salah satu jalannya adalah menerima resep-resep yang dianjurkan oleh negara donor dan lembaga keuangan internasional maupun belajar dari keberhasilan maupun kegagalan negara-negara lain. Kondisi ini mendasari perubahan-perubahan kebijakan ekonomi negara-negara berkembang adalah pergeseran yang semakin luas dalam bidang pembangunan dimana diberlakukan oleh negara, agensi-agensi internasional dan organisasi non pemerintah dimana pergeseran dari wacana pembangunan yang statis ke arah wacana pembangunan yang berorientasi pasar berlangsung.⁶

Neoliberalisme telah lama merasuk kedalam sistem ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Salah satu contohnya adalah dengan pemberlakuan UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang dijalankan oleh pemerintah orde baru sebagai pembuka jalan bagi masuknya investasi asing ke Indonesia. Selain terkait dengan keterkaitan antara Indonesia dengan negara dan lembaga donor dengan ideologi neoliberal, salah satu hal yang kemudian menjadi instrumen bagi importasi ideologi neoliberal ini terjadi adalah dengan pendidikan yang didapatkan dari para teknokrat yang pernah belajar di Universitas yang sangat kental dengan tradisi ideologi neoliberal. Di Indonesia kelompok teknokrat pada masa orde baru yang memiliki peran krusial dan pengaruh dominan terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikenal dengan

4 Budi Winarno, *Melawan Gurita Neoliberalisme* (Jakarta : Erlangga, 2010) 13.

5 Ibid 17.

6 Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006) 4.

“mafia Berkeley”⁷. Oleh karena itu arah kebijakan ekonomi yang diambil secara sadar maupun tidak sadar dilandasi oleh semangat neoliberal yang berorientasi kepada kepentingan pasar dan korporasi besar.

Neoliberalisme dan Ironi Kemiskinan di Indonesia.

Pembangunan yang dilakukan pada masa Orde Baru terlihat akan membawa Indonesia dalam kemakmuran dengan berbagai rencana pembangunan baik jangka pendek, menengah dan panjangnya. Namun program pembangunan tersebut merupakan sebuah kebijakan terkait dengan pembangunan dalam tataran makro yang hanya dinikmati oleh kalangan elit tertentu. Karena pada dasarnya program tersebut berlandaskan kepada teori *trickle down effect* yang seringkali digunakan oleh kaum neoliberalisme, namun pada kenyataannya pertumbuhan dikalangan kelas menengah keatas tidak dapat dinikmati oleh kalangan bawah. Kondisi ini yang kemudian membuat terjadinya kemiskinan yang hingga saat ini sangat sulit untuk diberantas meskipun pada masa tersebut hal ini tidak terlihat dengan jelas karena tertutupi oleh politik mercusuar yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru. Sejak awal rencana pembangunan lima tahun (repelita) I sudah dicanangkan untuk mengubah struktur perekonomiannya yang awalnya bercorak agraris menjadi lebih kepada pengembangan sektor Industri. Adanya transformasi struktural dalam proses pembangunan ekonomi ini telah mengangkat Indonesia yang tadinya masuk kategori negara non industri (negara agraris) menjadi negara semi industri (*semi industrializing country*).⁸ Pergeseran ini yang kemudian memunculkan politik mercusuar yang ditandai dengan pembentukan berbagai macam industri pada modal untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Politik mercusuar ini menekankan kepada kebijaksanaan dan pembangunan struktur ekonomi yang bersifat makro dengan berbagai proyek besar untuk menundang investasi asing dan menggenjot pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut dilakukanlah berbagai deregulasi. Pada saat tersebut deregulasi berjalan lebih rutin dan berkelanjutan serta tidak dalam bentuk satu paket melainkan setiap aspek ataupun kebijakan yang dihadapkan dapat lebih mempercepat proses deregulasi tersebut agar ekonomi Indonesia lebih cepat terintegrasi dengan ekonomi dunia.⁹ Dua hal tersebut kemudian menjadi dasar bagi berjalannya

⁷ Budi Winarno, Op.Cit. 53.

⁸ Edy Suandi Hamid, Arah Pergeseran Ekonomi Indonesia Pra Pasar Bebas dalam *Agenda Aksi Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*, Rizal Ramli et,all (Yogyakarta : Pusat Pengembangan Manajemen UII, 1997) 261.

⁹ Ibid, 268.

pembangunan dan ekonomi Indonesia pada saat tersebut yang kemudian akan membawa Indonesia kedalam jurang krisis pada tahun 1997. Krisis ekonomi yang menimpa Indonesia terkait dengan bobroknya fondasi ekonomi makro yang dimiliki Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada masa orde baru disebut sebagai *bubble economy* karena angka pertumbuhan ekonomi yang terlihat hanya berada dalam tataran ekonomi makro yang dibiayai oleh hutang luar negeri bukan dari produktivitas dalam negeri (sektor riil).

Upaya yang dilakukan untuk keluar dari krisis yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah dengan meminta bantuan kepada dana moneter internasional, IMF. Jelas hal ini akan semakin memperkuat warna neoliberalisme dalam sistem ekonomi Indonesia. Kondisi ini terkait dengan kewajiban penerapan *Structural Adjustment Programs* (SAP's) yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman dari IMF yang sangat kental dengan preskripsi-preskripsi dari neoliberalisme. SAP's akan menjadi ruh dalam setiap kebijakan dan struktur ekonomi Indonesia terkait dengan upaya stabilisasi ekonomi Indonesia pasca krisis. Kondisi ini dapat kita lihat, 10 tahun setelah reformasi, sistem ekonomi yang dianut Indonesia mengarah pada sistem neoliberalisme sebagai contoh, adanya anggaran pembiayaan untuk privatisasi BUMN.¹⁰ Selain itu kenaikan tarif dasar listrik maupun bahan bakar minyak, serta pupuk terkait dengan pencabutan subsidi merupakan corak yang sangat jelas dari kebijakan ekonomi neoliberal yang mensyaratkan pencabutan subsidi sebagai upaya penghematan anggaran agar dialokasikan kepada hal lain yang dianggap menguntungkan. Dimana pada akhirnya hal ini akan semakin menyengsarakan rakyat kecil dan menguntungkan pada pemilik modal dan investor asing. Karena dalam ajaran neoliberalisme masyarakat dan negara hanyalah instrumen yang diperlukan untuk menjamin terjadinya akumulasi kekayaan oleh anggota-anggota partikelir dalam masyarakat.¹¹

Sungguh sebuah ironi saat Indonesia, sebagai negara yang memiliki sumber daya alam melimpah tidak dapat memanfaatkan hal tersebut untuk kemakmuran rakyatnya sendiri. Kondisi ini terjadi karena pada awal masa pemerintahan orde baru, kelangkaan sumber-sumber investasi dalam negeri diatasi dengan menambah hutang luar negeri dan investasi asing yang dampaknya masih dapat kita rasakan hingga kini. Dalam situasi semacam ini, kekayaan alam hanya mempunyai korelasi sedikit saja atas kemakmuran suatu bangsa karena sumber-sumber alam yang ada lebih banyak dinikmati oleh pihak asing.¹² Tengok saja operasional perusahaan-

¹⁰ Revisond Baswir dalam "Neoliberalisme Terus Diperdebatkan", Kompas, Jum`at 5 Juni 2009.

¹¹ Deliarnov, Ekonomi Politik (Jakarta : Erlangga, 2006) 164.

¹² Budi Winarno, Isu-Isu Global Kontemporer, (Yogyakarta : CAPS, 2011) 71.

perusahaan besar yang ada di Indonesia baik yang bergerak dalam bidang ekstraktif sumber daya alam maupun industri. Freeport sebagai contoh, dimana operasional perusahaan ini telah menghasilkan banyak kekayaan bagi perusahaan ini, tetapi sama sekali tidak memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang berada di Indonesia, Papua maupun warga yang berada disekitar wilayah operasionalnya. Demikian pula dengan perusahaan manufaktur asing yang dikenal dengan industri *footloose*,¹³ meskipun kemudian membuka lapangan kerja tetapi dalam kenyataannya tetap tidak dapat mengangkat para buruhnya dari garis kemiskinan karena standar upah yang rendah.

Kemiskinan di Indonesia juga ditandai oleh adanya ketimpangan antar wilayah. Menurut data yang ada mengungkapkan bahwa kawasan Indonesia bagian timur mempunyai tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan Indonesia bagian barat. Krisis ekonomi pada tahun 1997 memperlihatkan bahwa masyarakat kota lebih rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan, bahkan jumlah penduduk miskin di perkotaan diperkirakan masih meningkat sampai sekarang.¹⁴ Salah satu jenis kemiskinan yang dihadapi oleh Indonesia maupun negar berkembang lainnya adalah kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut berarti mereka yang benar-benar miskin dan berada dibawah garis kemiskinan.¹⁵ Kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pokok (makanan, pakaian dan tempat tinggal), layanan kesehatan, akses terhadap pendidikan serta pekerjaan menjadi salah satu pendorong kemiskinan absolut sebagian besar rakyat Indonesia. Tidak sulit untuk melihat dengan jelas fenomena ini, terutama diperkotaan, perumahan kumuh, gelandangan dan anak jalanan sangat kontras dengan berbagai gedung bertingkat serta gemerlap pusat perbelanjaan.

Peran Negara Dalam Pengentasan Kemiskinan

Terjadinya peng-agungan terhadap mekanisme pasar yang diyakini akan dengan mendistribusikan kesejahteraan secara merata dibandingkan dengan negara. meskipun demikian, tidak ingin dikatakan sebagai penganut neoliberalisme berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan seakan hanya sebagai upaya

13 Istilah *footloose* mengacu kepada industri manufaktur yang merupakan subkontraktor merk-merk tertentu dari luar negeri untuk memproduksi produknya di dalam negeri atas pertimbangan tenaga kerja murah, pasar dan bahan baku.

14 Sri Adiningsih, 1 Dekade Pasca Krisis Indonesia (Yogyakarta : Kanisius, 2008) 163.

15 Gunawan Sumodiningrat, Riant Nugroho et,all, Membangun Indonesia Emas : Model Indonesia Baru Menuju Negara Bangsa Yang Unggul Dalam Persaingan Global, (Jakarta : Elexmedia Computindo, 2005) 80.

pencitraan semata, karena sebenarnya kebijakan yang diambil hanya akan semakin menambah jumlah orang miskin di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang kemudian diambil dalam menanggulangi kemiskinan diibaratkan “seperti menggarami air laut”. Seperti contohnya pemberian bantuan langsung tunai (BLT), jaring pengaman sosial (JPS), pemberian beras miskin (raskin) dan masih banyak lagi kebijakan yang tidak efektif. Upaya-upaya tersebut hanya akan meningkatkan daya beli masyarakat semata, namun tidak membuat mereka menjadi produktif. Pemerintah memberikan justifikasi bahwa saat ini melalui berbagai program tersebut tingkat kemiskinan sudah dapat diturunkan dengan berpegang kepada data dari Badan Pusat Statistik. Seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1

2011	2010	2009	2008	2007
30.018.930	31.032.400	32.530.000	34.963.300	37.168.300

Sumber: BPS

Namun, hal ini hanya sebatas angka-angka yang kemudian tidak merepresentasikan kenyataan sebenarnya terkait dengan jumlah orang miskin yang ada di Indoensia. Terlebih dengan berbagai kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah terkait kenaikan harga BBM pada bulan April tahun 2012 ini bukan tidak mungkin akan membuat jumlah orang miskin semakin bertambah. Kondisi ini terkait dengan penurunan daya beli masyarakat akibat melonjaknya harga-harga sebagai dampak berantai dari kenaikan harga BBM tersebut.

Orang miskin senantiasa diposisikan sebagai pihak yang kalah (*looser*) dalam kompetisi untuk mengakses sumber ekonomi. Di negara yang menjadi pengusung neoliberal seperti AS, keberadaan pihak yang kalah tersebut diberikan subsidi dalam berbagai hal untuk menjamin kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi. Namun, lain halnya dengan di negara berkembang seperti Indonesia, orang miskin tidak banyak mendapat perhatian dari negara meskipun ada beberapa kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut pada kenyataannya sangat tidak efektif karena hanya kebijakan yang bersifat tambal sulam dan tidak menyeluruh. Padahal konstitusi Indonesia telah mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kondisi ini terkait dengan penguasaan aset-aset vital negara oleh pihak asing yang dilakukan melalui privatisasi. Neoliberalisme akan mengorbankan masyarakat dengan daya beli lemah termasuk anak dan perempuan, kebebasan hanya bisa dinikmati bila bisa membelinya kondisi ini menimbulkan pergeseran, dimana hubungan warga negara dan negara tidak lagi terkait hak, tetapi warga negara menjadi konsumen.¹⁶ Oleh karena itu negara semakin kehilangan

16 Driyarkara Herry Priyono, dikutip dalam, “Neoliberalisme Harus Dilawan”, Kompas, Kamis, 25 Juni 2009.

perannya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya yang dikuasai oleh swasta/ mekanisme pasar. Dengan demikian, peran negara harus dikurangi dan digantikan dengan pihak swasta. Dalam kondisi ini, pasar, deregulasi, debirokratisasi, privatisasi dan pengurangan program-program kesejahteraan dan subsidi dijadikan sebagai mantra dalam mengatasi berbagai masalah sosial-ekonomi sekaligus untuk mengejar pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹⁷ Namun dalam kenyataannya, mekanisme pasar telah gagal meraih tujuan pembangunan yang diharapkan, bahkan pembangunan yang semata-mata bersandarkan kepada bekerjanya pasar telah menghasilkan dampak buruk dalam bentuk ketimpangan dan kemiskinan.¹⁸

Kegagalan pasar neoliberal dalam mengurangi laju kemiskinan yang bahkan membuatnya menjadi lebih buruk karena kemiskinan pada dasarnya adalah masalah kelembagaan.¹⁹ Oleh karena itu kemiskinan harus diatasi dengan melibatkan kelembagaan, dimana yang dimaksud kelembagaan dalam hal ini adalah aturan perilaku atau aturan yang secara umum diterima anggota suatu kelompok sosial atau dalam hal ini masyarakat, yang pelaksanaannya mendapatkan pengawasan secara internal maupun eksternal. Dimana hal ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, tetapi bagi Indonesia pemerintah tidak dapat menolak berbagai tekanan untuk melakukan liberalisasi serta pencabutan subsidi. Padahal bagi negara berkembang seperti Indonesia pencabutan subsidi akan menyebabkan menurunnya tingkat daya beli masyarakat serta liberalisasi yang akan membuat masyarakat Indonesia hanya akan menjadi konsumen yang akan memperkaya sebagian orang semata. Kondisi ini akan sangat sulit untuk diatasi mengingat berbagai tekanan dan arus liberalisasi perekonomian yang sangat sulit untuk terbendung.

Formulasi kebijakan dari pemerintah masih memegang peran yang sangat penting dalam hal pemerataan kesejahteraan, dengan catatan bahwa birokrasi yang ada bersih dari segala macam penyelewengan. Namun, saat ini Indonesia seakan berada dalam dilema menyerahkan distribusi kesejahteraan kepada pasar hanya akan menciptakan kesenjangan dan peningkatan kemiskinan sementara saat pemerintah mengambil peran dalam distribusi kesejahteraan tersebut harus dihadapkan kepada birokrasi yang belum sepenuhnya bersih dari tindak korupsi. Karena untuk melakukan pembangunan serta distribusi kesejahteraan yang dilakukan oleh negara, memerlukan birokrat yang kompeten. Dimana pada akhirnya

17 Deliarnov, Loc.cit.

18 Budi Winarno, *Melawan Gurita Neoliberalisme*, Op.Cit, 65.

19 Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik : Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009) 226.

kedua mekanisme baik pasar maupun negara sekalipun dalam kasus Indonesia tidak akan dapat mendistribusikan kesejahteraan secara merata sehingga pemberantasan kemiskinan hanya akan menjadi wacana semata. Bahkan kondisi ini akan menyebabkan kebijaksanaan dan struktur ekonomi yang mendorong disparitas pendapatan yang melebar sehingga menyebabkan begitu banyak penduduk hidup dibawah garis kemiskinan.²⁰

Kembali ke Sistem Ekonomi Pancasila

Sistem ekonomi pancasila atau ekonomi kekeluargaan yang dikehendaki pasal 33 UUD 1945 dengan jelas menggariskan bahwa adanya intervensi dari negara. Selain itu inti dari sistem ekonomi pancasila juga terdapat pada pasal 23, 27 dan 34. Sistem ekonomi pancasila yaitu sistem pasar yang dikendalikan melalui intervensi negara.²¹ Dari Pancasila sendiri, sila yang sangat relevan terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan adalah sila keadilan sosial. Sila ini mengandung dua makna, yakni sebagai prinsip pembagian pendapatan yang adil dan prinsip demokrasi ekonomi. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perseorangan. Dalam hal ini masyarakat tidak disamakan dengan negara, sehingga dapat terlihat jelas bahwa sistem ekonomi Pancasila tidak saja menolak free fight liberalism akan tetapi juga etatisme, dimana negara beserta aparatur ekonomi negara mendominasi penuh dan mematikan inisiatif masyarakat.²²

Sistem ekonomi pancasila merupakan sebuah sistem yang dirasakan sangat cocok dengan falsafah maupun kondisi masyarakat Indonesia itu sendiri, tetapi implementasi dari hal ini sangat sulit atau bahkan hanya sekedar menjadi wacana semata. Salah satu bukti yang paling jelas adalah mati surinya koperasi yang seharusnya menjadi soko guru perekonomian rakyat Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir. Koperasi yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam upaya pengentasan kemiskinan, konsep inilah yang kemudian melandasi pemenang Nobel Ekonomi, Mohammad Yunus untuk mengembangkan bank yang bernama Grameen Bank dimana diperuntukan bagi orang-orang miskin di Bangladesh. Hal ini pun seharusnya di implementasikan di Indonesia, dimana upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya dilakukan dengan kebijakan tambal sulam dan bersifat sementara tetapi harus mencakup sebuah penyelesaian yang komprehensif dan jangka panjang. Karena permasalahan kemiskinan

20 Budi Winarno., Op.cit, 14.

21 Tresna Priyana Soemardi, Peranan Iklim Persaingan Usaha yang Sehat Dalam Mewujudkan Sistem Inovasi Nasional, UMKM yang Kuat dan Pengentasan Kemiskinan dalam *MDG's Sebarang Lagi Sanggupkah Kita Menghapus Kemiskinan Dunia?*, Budi Sulistyio, Jodie Perdanakusuma dan Ninok Leksono, eds (Jakarta : Kompas Gramedia, 2010) 154.

22 Emil Salim, *Kembali ke Jalan Lurus : Esai-Esai 1966-1999* (Jakarta : Pustaka Alvabeta, 2000) 5.

yang saat ini terjadi, seperti yang telah disinggung sebelumnya terjadi akibat kesulitan masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi, oleh karena itu penyediaan akses terhadap sumber ekonomi dalam hal ini modal harus dibuka selebar-lebarnya tanpa harus terkendala oleh orientasi keuntungan semata dari si pemberi modal. Dimana hal ini tidak dapat dilakukan dengan mengandalkan mekanisme pasar seperti yang senantiasa di resepkan oleh ekonomi neoliberal.

Kesimpulan.

Pembangunan yang dilandasi dengan ide-ide neoliberalisme memang sangat rentan untuk menimbulkan berbagai ketimpangan serta meningkatkan angka kemiskinan. Kondisi ini membuktikan bahwa neoliberalisme telah gagal mewujudkan janji-janjinya untuk membawa negara berkembang kepada kemakmuran. Demikian pula dengan Indonesia, neoliberalisme yang telah merasuki pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa keterkaitan Indonesia dengan berbagai lembaga donor dan ketergantungan terhadap investasi asing menjadi salah satu pintu masuknya ide-ide neoliberalisme dalam pembangunan di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan banyaknya birokrat ekonomi yang beraliran neoliberal terkait dengan latar belakang pendidikan yang mereka miliki. Neoliberalisme pada kenyataannya telah membawa Indonesia dalam keterpurukan ekonomi serta permasalahan kemiskinan yang sangat akut. Dimana banyak dari rakyat Indonesia tidak dapat memperoleh akses terhadap sumber-sumber ekonomi karena akumulasi dari sumber ekonomi tersebut dikuasai oleh sekelompok orang tertentu. Kondisi ini jelas terkait dengan tidak berjalannya distribusi kesejahteraan yang dilakukan oleh mekanisme pasar. Disisi lain pemerintah pun kesulitan untuk memformulasikan upaya yang tepat dalam mendistribusikan kesejahteraan kepada masyarakatnya terkait dengan kebobrokan birokrasi serta masih bersemayamnya ide neoliberalisme dalam sistem ekonomi dan pembangunan Indonesia. Terkait dengan upaya pembangunan serta pemberantasan kemiskinan, Indonesia harus kembali kepada sistem ekonomi Pancasila yang cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia sehingga akan mampu untuk menjadi solusi kemiskinan di Indonesia yang terkait dengan permasalahan distribusi kesejahteraan serta akses terhadap sumber ekonomi yang kemudian dimonopoli oleh segelintir orang akibat berjalannya mekanisme pasar yang dilandasi oleh nilai-nilai neoliberal yang masih mewarnai jalannya sistem ekonomi saat ini.

Referensi:

- "Neoliberalisme Harus Dilawan", Kompas, Kamis, 25 Juni 2009.
- Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik : Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- Baylis, Jhon dan Smith, Steve (ed) *Globalization in World Politics 3dr eds*, Oxford : Oxford University Press, 2001.
- Budi Sulistyio, Jodie Perdanakusuma dan Ninok Leksono, (eds) *MDG`s Sebentar Lagi Sanggupkah Kita Menghapus Kemiskinan Dunia?*, Jakarta : Kompas Gramedia, 2010.
- Budi Winarno, *Globalisasi Peluang atau Ancaman Bagi Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 2008.
- _____, *Isu-Isu Global Kontemporer*, Yogyakarta : CAPS, 2011.
- _____, *Melawan Gurita Neoliberalisme*, Jakarta : Erlangga, 2010.
- Deliarnov, *Ekonomi Politik*, Jakarta : Erlangga, 2006.
- Emil Salim, *Kembali ke Jalan Lurus : Esai-Esai 1966-1999* Jakarta : Pustaka Alvabeta, 2000 .
- Gunawan Sumodiningrat, Riant Nugroho et,all, *Membangun Indonesia Emas : Model Pembangunan Indonesia Baru Menuju Negara Bangsa Yang Unggul Dalam Persaingan Global*, Jakarta : Elexmedia Computindo, 2005.
- Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Revrisond Baswir dalam "Neoliberalisme Terus Diperdebatkan", Kompas, Jum`at 5 Juni 2009.
- Rizal Ramli et,all *Agenda Aksi Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*, Yogyakarta : Pusat Pengembangan Manajemen UII, 1997.
- Sri Adiningsih, *1 Dekade Pasca Krisis Indonesia*, Yogyakarta : Kanisius, 2008.
- Sri Liani Suselo dan Tarsidin, "Kemiskinan di Indonesia : Pengaruh Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Oktober 2008.